

BAB I

PENDAHULUAN

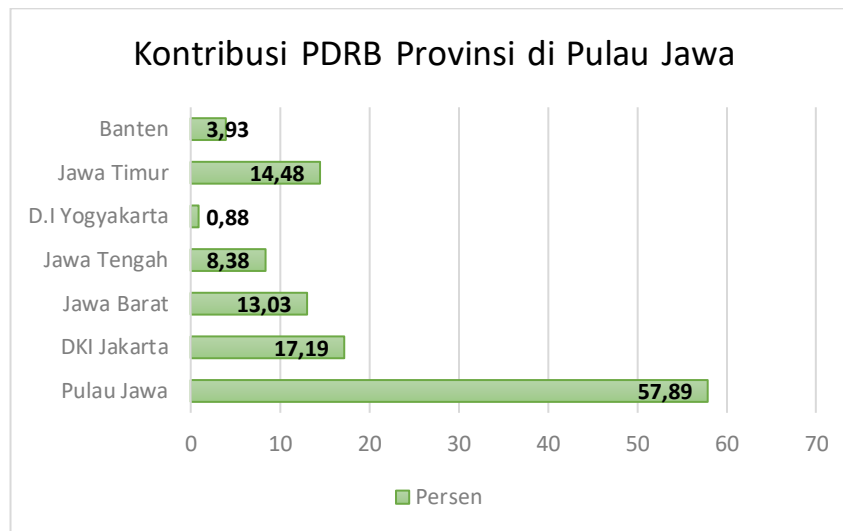
1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional adalah suatu usaha guna meningkatkan aspek kehidupan masyarakat serta bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan nasional yang baik serta berkelanjutan menjadi tujuan vital bagi setiap negara. Pembangunan nasional mencakup pada beberapa aspek, salah satunya adalah pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi merupakan suatu usaha untuk mencapai kemajuan dalam bidang perekonomian.

Indikator penentu dalam keberhasilan pelaksanaan pembangunan ekonomi dapat diketahui melalui pertumbuhan ekonomi. Teori pertumbuhan ekonomi neo klasik menjelaskan bahwa perkembangan tiga faktor produksi yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi terdiri dari peningkatan kualitas serta kuantitas tenaga kerja, peningkatan modal dan peningkatan teknologi (Todaro & Smith, 2015). Menurut Badan Pusat Statistik, parameter dalam mengukur pertumbuhan ekonomi adalah Produk Domestik Regional Bruto, yang menggambarkan mengenai pertambahan nilai barang dan jasa yang diperoleh dari keseluruhan sektor perekonomian pada suatu daerah tertentu.

Pulau Jawa merupakan wilayah yang menjadi pusat perekonomian di Indonesia. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan kontribusi PDRB Pulau Jawa di tahun 2021 adalah sebesar 57,89 % terhadap PDB Indonesia. Kontribusi tersebut merupakan setengah dari total keseluruhan PDB di Indonesia. Wilayah Pulau Jawa terbagi menjadi beberapa provinsi besar, yang meliputi Jawa Timur, Jawa Tengah, D.I Yogyakarta, Jawa Barat, DKI Jakarta dan Banten. Berikut merupakan data kontribusi PDRB di tahun 2021 menurut Provinsi di Pulau Jawa :

Gambar 1. 1 Kontribusi PDRB Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2021 (persen)



Sumber :Badan Pusat Statistik, 2021. (diolah)

Gambar 1.1 menunjukkan data terkait dengan kontribusi PDRB di Pulau Jawa dimana Jawa Timur menjadi provinsi dengan kontribusi terbesar kedua yang menyumbang sebesar 14,48% setelah DKI Jakarta. Besarnya kontribusi PDRB yang dihasilkan Provinsi Jawa Timur nantinya dapat membantu meningkatkan Produk Domestik Bruto Indonesia (Setyadi et al., 2020). Meningkatnya PDRB dapat mengakibatkan terjadinya peningkatan terhadap penyerapan tenaga kerja (Warapsari et al., 2020).

Penyerapan tenaga kerja yang tinggi akan menjadi sumber daya penting seiring dengan proses pembangunan ekonomi. Namun, Penyerapan tenaga kerja yang tinggi juga harus diimbangi oleh kualitas yang dimiliki oleh pekerja. Jika jumlah tenaga kerja yang dimiliki semakin besar serta kualitas tenaga kerja semakin baik, hal tersebut akan membantu dalam menambah nilai pada produksi nasional (Abdillah, 2019).

Jawa Timur adalah sebuah provinsi yang terletak di wilayah bagian timur Pulau Jawa, Indonesia. Secara keseluruhan wilayah Jawa Timur terbagi atas 29 Kabupaten dan 9 Kotamadya. Jawa Timur memiliki total penduduk terbesar kedua di Indonesia yang mencapai hingga 40.878.789 Jiwa (Badan Pusat Statistik Jawa Timur, 2023).

Dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi, peran manusia sebagai subjek dan objek pembangunan tidak dapat dipisahkan (Bonerri et al., 2018). Sumber daya manusia dengan jumlah yang besar tidak selalu berada pada sisi yang menguntungkan dalam proses pembangunan, bahkan dapat menjadi hal yang merugikan karena menjadi beban dalam proses pembangunan itu sendiri. Melimpahnya sumber daya manusia yang dimiliki dapat menjadi modal pembangunan yang menguntungkan ketika jumlah tenaga kerja yang tersedia juga besar.

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur mencatatkan bahwa jumlah tenaga kerja pada tahun 2021 mencapai hingga 21.037.750 jiwa. Jumlah tersebut tersebar di berbagai wilayah di Jawa Timur.

Tenaga kerja memegang peran penting pada proses pembangunan dan produksi. Mankiw (2007) menerangkan bahwa modal dan tenaga kerja adalah unsur penting dalam proses produksi. Jumlah tenaga kerja yang besar juga harus diikuti oleh kualitas yang baik sehingga dapat mendukung proses pembangunan melalui produktivitas yang unggul. Jumlah tenaga kerja yang besar apabila didayagunakan secara maksimal akan menjadi modal dasar yang efektif dalam peningkatan produktivitas tenaga kerja.

Produktivitas sebagai salah satu indikator ekonomi memiliki keterkaitan dengan pertumbuhan ekonomi dan daya saing suatu negara. Produktivitas tenaga kerja merupakan kapasitas dari tenaga kerja dalam menghasilkan suatu *output*. *International Labour Organization* (ILO) menjelaskan bahwa produktivitas tenaga kerja menggambarkan total *output* (diukur dengan PDB) yang dihasilkan tenaga kerja dalam kurun waktu tertentu.

Pengukuran produktivitas bertujuan untuk mengetahui tingkat efisiensi proses produksi oleh tenaga kerja dalam menghasilkan suatu *output*. Melalui pengukuran produktivitas diharapkan dapat menghasilkan gambaran mengenai kualitas pekerja, peluang, tantangan, dan kontribusi pekerja terhadap perekonomian. Ukuran produktivitas tenaga kerja dapat dihitung melalui besarnya Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan per tenaga kerja pada suatu kegiatan ekonomi (Puspasari & Handayani, 2020). Pengukuran produktivitas tenaga kerja dilakukan di seluruh tingkatan, baik tingkat nasional maupun regional. Tujuan dari pengukuran produktivitas di tingkat regional adalah untuk mengetahui sejauh mana setiap provinsi dan kabupaten/kota mampu melaksanakan program-program pembangunan nasional.

Berdasarkan pengukuran produktivitas tenaga kerja di Provinsi Jawa Timur, dapat diperoleh hasil bahwa terdapat ketimpangan produktivitas antar wilayah. Tingkat produktivitas yang rendah masih mendominasi pada tiap wilayah ketika dibandingkan dengan produktivitas provinsi. Berikut merupakan data perbandingan produktivitas tenaga kerja di wilayah Jawa Timur.

Tabel 1. 1 Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Kabupaten/kota terendah di Provinsi Jawa Timur Tahun 2017-2021 (Juta Rupiah/Tenaga Kerja)

Rendah					
Kabupaten/Kota	2017	2018	2019	2020	2021
Kab. Pamekasan	23,16	23,93	25,07	23,99	25,88
Kab. Sampang	28,33	29,15	29,73	28,1	27,81
Kab. Ngawi	30,18	26,61	28,92	28,76	28,93
Kab. Ponorogo	26,51	27,52	29,11	28,86	29,19
Kab. Pacitan	28,52	29,70	30,84	30,28	30,75
Kab. Bondowoso	28,33	30,35	29,59	29,72	31,17
Kab. Trenggalek	30,57	29,98	31,91	30,37	32,60
Kab. Situbondo	32,42	33,12	34,87	33,84	35,40
Kab. Kediri	31,99	34,85	34,15	34,22	35,68
Kab. Bangkalan	38,22	38,33	41,95	38,37	36,01
Kab. Nganjuk	33,79	31,58	33,90	34,24	36,19
Kab. Probolinggo	37,32	37,28	38,50	35,72	36,34
Kab. Magetan	31,88	32,7	36,36	35,43	36,35
Kab. Sumenep	37,12	38,39	36,56	36,37	36,61
Kab. Madiun	35,09	33,92	35,05	34,84	37,84
Kab. Blitar	37,33	38,81	39,12	39,44	40,57
Kab. Lumajang	41,04	39,29	42,30	40,69	42,30
Kab. Lamongan	40,72	41,77	43,64	41,73	42,92
Kab. Jember	40,25	41,16	43,60	42,10	43,06
Kab. Jombang	40,46	40,97	42,07	42,87	43,52
Kab. Tulungagung	46,94	45,99	48,63	45,71	47,77
Kab. Malang	48,82	47,02	49,30	47,43	50,70
Kota Pasuruan	56,43	58,40	59,99	56,14	56,34
Kab. Banyuwangi	56,30	59,19	62,41	61,01	62,79
Kab. Tuban	69,94	66,28	72,30	66,19	65,92
Kota Blitar	57,72	59,33	62,75	64,51	66,24
Kota Probolinggo	64,74	69,03	74,12	67,33	68,57
Kota Mojokerto	68,83	69,17	77,42	73,63	77,05
Provinsi Jawa Timur	73,75	75,05	78,44	76,87	79,34

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021. (diolah)

Tabel 1. 2 Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Kabupaten/kota tertinggi di Provinsi Jawa Timur Tahun 2017-2021 (Juta Rupiah/Tenaga Kerja)

Tinggi					
Kabupaten/Kota	2017	2018	2019	2020	2021
Kota Kediri	586,92	595,97	633,27	590,84	589,86
Kota Surabaya	259,33	266,36	274,09	273,83	287,01
Kab. Gresik	143,64	150,48	160,04	155,21	152,1
Kota Batu	126,05	140,99	148,69	141,33	146,16
Kab. Sidoarjo	122,36	124,25	125,39	126,83	131,26
Kab. Pasuruan	120,87	120,31	126,93	126,63	128,15
Kota Malang	113,92	114,59	119,56	120,26	122,37
Kota Madiun	104,92	113,91	115,81	111,32	118,96
Kab. Mojokerto	88,51	92,05	99,27	98,89	100,7
Kab. Bojonegoro	94,72	102,07	101,44	97,48	95,08
Provinsi Jawa Timur	73,75	75,05	78,44	76,87	79,34

Sumber :Badan Pusat Statistik, 2021. (diolah)

Tabel 1.1 dan Tabel 1.2 memberikan gambaran terkait dengan tingkat produktivitas pekerja di Jawa Timur. Tabel 1.1 merupakan kategori daerah dengan tingkat produktivitas yang lebih rendah dibandingkan dengan tingkat produktivitas provinsi sedangkan pada tabel 1.2 menunjukkan daerah dengan tingkat produktivitas yang lebih tinggi dibandingkan produktivitas provinsi.

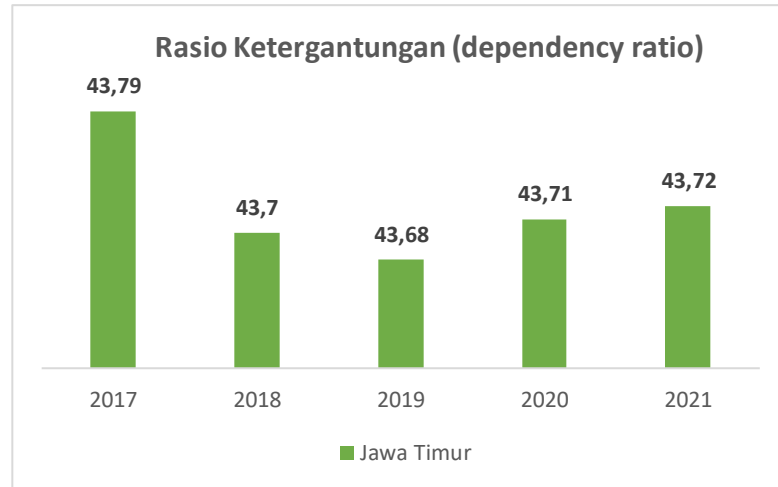
Berdasarkan data tingkat produktivitas tenaga kerja 38 kabupaten/kota diatas, dapat diketahui bahwa terjadi ketimpangan yang cukup signifikan, terdapat 10 kabupaten/kota yang memiliki tingkat produktivitas tertinggi dibandingkan dengan produktivitas provinsi, yang diketahui bahwa produktivitas tertinggi dihasilkan oleh Kota Kediri dengan nilai sebesar 589,86 juta rupiah/tenaga kerja di tahun 2021. Sedangkan tingkat produktivitas rendah dihasilkan oleh 28 kabupaten/kota dengan produktivitas terendah berada di angka 25,88 juta rupiah/tenaga kerja yang dihasilkan oleh Kabupaten Pamekasan pada tahun 2021.

Ketimpangan yang terjadi dapat menjadi hambatan bagi peningkatan pendapatan regional sehingga akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi (Yuniasih et al., 2013). Selain terjadi ketimpangan antar daerah, produktivitas di wilayah Jawa Timur juga mengalami fluktuasi selama 5 tahun kebelakang ini. Terkait permasalahan yang terjadi, pemerintah perlu memperhatikan faktor-faktor yang berpengaruh dalam mendorong peningkatan produktivitas tenaga kerja.

Salah satu prioritas utama yang perlu diperhatikan adalah peningkatan produktivitas pekerja mengingat di tahun 2020-2030 Indonesia mengalami puncak dari bonus demografi yang ditandai dengan besarnya jumlah penduduk usia produktif dibandingkan dengan penduduk usia anak-anak dan lanjut usia (Badan Pusat Statistik, 2022).

Suryadi dalam (Fadillah et al., 2022) menjelaskan bahwa bonus demografi adalah fenomena di mana struktur penduduk berada pada kondisi yang menguntungkan di sisi pembangunan sebab penduduk usia produktif akan semakin besar sedangkan penduduk usia muda semakin sedikit dan usia lanjut belum begitu banyak. Bonus demografi memiliki keterkaitan dengan produktivitas. Salah satu indikator sebagai tolak ukur demografi adalah rasio ketergantungan (*dependency ratio*). Berikut merupakan data rasio ketergantungan berdasarkan publikasi BPS Jawa Timur selama tahun 2017 – 2021 :

Gambar 1. 2 Rasio Ketergantungan Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 – 2021 (persen)



Sumber :Badan Pusat Statistik, 2021. (diolah)

Rasio ketergantungan mencerminkan 2 kelompok dalam struktur umur penduduk , yaitu penduduk usia produktif dan non produktif. Gambar diatas menunjukkan bahwa rasio ketergantungan pada wilayah Jawa Timur mengalami fluktuasi di tahun 2017 – 2021. Peningkatan rasio ketergantungan menandakan bahwa beban tanggungan suatu daerah semakin besar, sehingga tingkat partisipasi penduduk dalam proses pembangunan terbilang rendah (Rahmani, 2021).

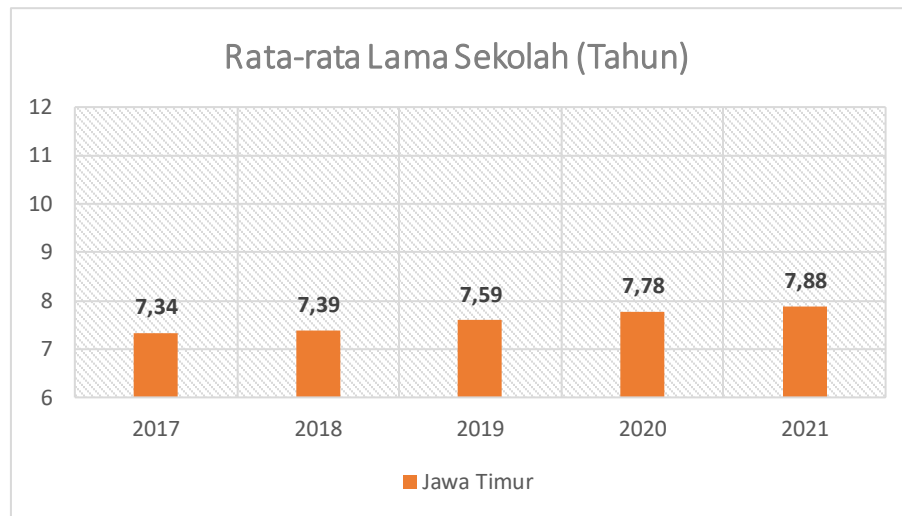
Peningkatan jumlah penduduk usia produktif akan menambah jumlah pekerja. Jumlah tenaga kerja yang besar serta diimbangi dengan kualitas yang baik dapat membantu peningkatan produktivitas ekonomi suatu daerah. Menurut teori produksi, *output* yang dihasilkan oleh tenaga kerja dipengaruhi oleh kualitas pekerja tersebut. Semakin tinggi kualitas yang dimiliki oleh tenaga kerja serta didukung pula dengan modal besar, maka *output* produksi yang dihasilkan akan semakin besar pula (Mankiw, 2007). Kualitas tenaga kerja dicerminkan dari

kualitas modal manusia yang dimiliki. Todaro & Smith (2015) menjelaskan bahwa modal manusia (*human capital*) dapat diukur melalui pendidikan.

Menurut data publikasi dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, di tahun 2021 tenaga kerja didominasi oleh pekerja lulusan SD dengan presentase sebesar 27% dari keseluruhan jumlah tenaga kerja. Sedangkan tenaga kerja dengan lulusan SMP memiliki presentase sebesar 18%. Tenaga kerja dengan lulusan SMA/SMK memiliki presentase sebesar 28% sedangkan lulusan diploma/sarjana berada di presentase 11%. Hal tersebut menandakan bahwa tenaga kerja lulusan SD/SMP mendominasi sebesar 45%. Sisanya merupakan tenaga kerja yang belum pernah sekolah atau tidak tamat SD. Melalui data tersebut, dapat dicerminkan bahwa tingkat pendidikan berdasarkan tamatan yang dimiliki oleh tenaga kerja masih cukup rendah.

Dalam mengukur kualitas pendidikan masyarakat pada suatu daerah, indikator yang dapat digunakan adalah rata-rata lama sekolah. Rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun keatas dalam menjalani pendidikan formal. Dalam penelitian ini, variabel pendidikan digambarkan melalui rata-rata lama sekolah. Berikut adalah data terkait dengan tingkat rata-rata lama sekolah di Jawa Timur selama tahun 2017 – 2021 :

**Gambar 1.3 Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Jawa Timur
Tahun 2017-2021 (Tahun)**



Sumber :Badan Pusat Statistik, 2021. (diolah)

Gambar 1.3 menjabarkan terkait data rata-rata lama sekolah di wilayah Jawa Timur yang mengalami peningkatan di tiap tahunnya. Peningkatan rata-rata lama sekolah memberikan gambaran bahwa program pendidikan menjadi salah satu fokus pemerintah guna untuk meningkatkan pendidikan di wilayah Jawa Timur. Walaupun demikian, nilai rata-rata lama sekolah yang dihasilkan hanya sebesar 7,6 tahun. Angka tersebut masih terbilang cukup rendah apabila dibandingkan dengan program wajib belajar 12 tahun oleh pemerintah. Rendahnya tingkat pendidikan dapat memberikan dampak terhadap rendahnya penawaran tenaga kerja (Maharani & Woyanti, 2023).

Salah satu faktor lainnya yang mempengaruhi peningkatan produktivitas pekerja adalah upah. Penetapan upah minimum adalah salah satu bentuk kebijakan dari pemerintah guna untuk melindungi para pekerja. Upah minimum merupakan standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha untuk memberikan upah

kepada pegawai di lingkungan kerja. Upah minimum yang semakin tinggi akan membantu meningkatkan motivasi dalam bekerja dan dapat menjamin kesejahteraan tenaga kerja.

Peran pemerintah dalam mengatur kebijakan penetapan upah minimum sangat diperlukan guna melindungi para tenaga kerja dari gaji yang terlalu rendah. Upah Minimum Regional (UMR) ditetapkan oleh gubernur pada tiap daerah yang didasarkan pada kebutuhan hidup layak serta dengan memperhatikan tingkat pertumbuhan ekonomi serta produktivitas daerah tersebut. Upah minimum regional saat ini terbagi ke dalam 2 tingkatan, yang meliputi upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten/kota (UMK). Standar minimal penetapan upah minimum kabupaten/kota adalah upah minimum provinsi, dimana upah minimum di tiap kabupaten/kota akan berbeda

**Tabel 1. 3 Rata-rata Upah Minimum Kabupaten/kota di Jawa Timur
Tahun 2017-2021.**

Tahun	Rata-rata UMK (Rp)	Pertumbuhan (%)
2017	1.871.218,95	-
2018	2.034.848,37	8,74
2019	2.254.314,24	10,79
2020	2.446.161,16	8,51
2021	2.482.462,88	1,48

Sumber :Badan Pusat Statistik, 2021. (diolah)

Dalam tabel 1.4, ditunjukkan data terkait dengan rata-rata upah minimum kabupaten/kota di wilayah Jawa Timur selama tahun 2017 – 2021. Berdasarkan data tersebut, dapat dianalisa bahwa UMK terus mengalami peningkatan setiap tahunnya dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2019. Meskipun rata-rata upah minimum terus mengalami peningkatan, namun pertumbuhannya cenderung

menurun di beberapa tahun, yang diakibatkan dari pandemi *covid-19* yang berdampak terhadap penurunan aktivitas perekonomian.

Memasuki era globalisasi, produktivitas menjadi salah satu konsen penting yang perlu diperhatikan guna meningkatkan daya saing negara. Oleh sebab itu, peran faktor-faktor pendukung dalam upaya peningkatan produktivitas pekerja perlu diperhatikan guna mendorong pertumbuhan produktivitas.

Berdasarkan penelitian terdahulu oleh Puspasari & Handayani (2020) terkait dengan pengaruh pendidikan, kesehatan dan upah terhadap produktivitas tenaga kerja dengan hasil yang didapat ialah pendidikan, upah dan kesehatan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap produktivitas tenaga kerja. Hasil berbeda ditemukan oleh Setyadi (2020) yang meneliti terkait dengan pengaruh pendidikan, dimana hasil yang didapati bahwa pendidikan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap produktivitas tenaga kerja. Panjaitan & Hilmawan (2023) mendapat hasil atas penelitiannya terkait dengan pengaruh rasio ketergantungan terhadap produktivitas tenaga kerja. Didapati hasil bahwa rasio ketergantungan tidak berpengaruh signifikan terhadap produktivitas tenaga kerja.

Terkait dengan latar belakang fenomena dan permasalahan yang sudah dijabarkan serta hasil penelitian sebelumnya yang memiliki perbedaan hasil, diperlukan penelitian lanjutan untuk mengkaji terkait faktor-faktor yang mendorong serta berpengaruh terhadap peningkatan produktivitas tenaga kerja. Penelitian dilakukan pada Provinsi Jawa Timur sebab besarnya jumlah tenaga kerja yang dimiliki serta PDRB yang dihasilkan cukup tinggi. Dengan potensi yang dimiliki tersebut akan memegang peran penting dalam menghasilkan produktivitas

tenaga kerja yang tinggi. Namun, pada kenyataannya, produktivitas yang dihasilkan masih perlu peningkatan kembali. Oleh sebab itu, peneliti mengambil judul penelitian “**Determinan Produktivitas Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Timur**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, dapat dirumuskan bahwa permasalahan pada penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Apakah rasio ketergantungan berpengaruh terhadap produktivitas tenaga kerja di Provinsi Jawa Timur ?
2. Apakah pendidikan berpengaruh terhadap produktivitas tenaga kerja di Provinsi Jawa Timur ?
3. Apakah upah minimum berpengaruh terhadap produktivitas tenaga kerja di Provinsi Jawa Timur ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan dilakukannya penelitian ini, yaitu :

1. Untuk menganalisis pengaruh rasio ketergantungan terhadap produktivitas tenaga kerja di Provinsi Jawa Timur.
2. Untuk menganalisis pengaruh pendidikan terhadap produktivitas tenaga kerja di Provinsi Jawa Timur.
3. Untuk menganalisis pengaruh upah minimum terhadap produktivitas tenaga kerja di Provinsi Jawa Timur.

1.4 Ruang Lingkup

Ruang Lingkup dari penelitian ini adalah untuk mengkaji faktor-faktor yang dapat berpengaruh terhadap produktivitas tenaga kerja di Provinsi Jawa Timur, dengan beberapa faktor yang diteliti yakni terkait rasio ketergantungan, pendidikan, dan upah minimum di Provinsi Jawa Timur selama periode tahun 2017-2021.

1.5 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, maka diharapkan dapat memperoleh manfaat sebagai berikut :

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan serta pengetahuan khusus di bidang ketenagakerjaan yang berkaitan dengan produktivitas tenaga kerja beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi serta masukan bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam menentukan kebijakan terkait dengan ketenagakerjaan, khususnya pada permasalahan tingkat produktivitas tenaga kerja yang ada di wilayah Jawa Timur serta kebijakan dalam meningkatkan kualitas SDM yang dimiliki.
3. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar pengembangan ilmu yang nantinya dapat digunakan sebagai sumber informasi dan referensi bagi penelitian berikutnya.